

**ANALISIS PENGARUH IPM, BELANJA MODAL, INFLASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA TAHUN 2010-2022*****Analysis of the Influence of Human Development Index, Capital Expenditure, Inflation on Labor Absorption in Indonesia 2010-2022***Sherly Ferdinandus<sup>1\*</sup>, Yenny Erika Lelatobur<sup>2</sup>

FEB, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

\*e-mail Correspondence Author: [ferdinandussherly@gmail.com](mailto:ferdinandussherly@gmail.com)**Informasi Artikel**

Diterima: 20 April 2025

Direvisi: 1 Mei 2025

Disetujui: 1 Juni 2025

**Kata Kunci***Penyerapan Tenaga Kerja; HDI; Belanja Modal; Inflasi***ASTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh IPM, Belanja Modal, Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2010-2022. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah IPM, Belanja Modal dan Inflasi, sedangkan variabel terikatnya adalah Penyerapan Tenaga Kerja. Salah satu cara pemerintah mengatasi inflasi adalah menetapkan kebijakan moneter yang ditujukan untuk menjaga kestabilan moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan membatasi jumlah uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga sehingga dapat menarik masyarakat untuk kembali menyimpan uang di bank. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel IPM tidak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, kemudian variabel Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, dan variabel Inflasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Secara simultan variabel IPM, Belanja Modal, Inflasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.*



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International. Any further

distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under Pusat Kajian Ekonomi Kepulauan dan Kemaritiman, FEB Pattimura University. E-ISSN: 3026-4472

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia masih mengalami tahap atau proses untuk membangun perekonomian yang lebih baik agar menjadi sebuah Negara yang maju. Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk tercapainya suatu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Negara tersebut. Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang dan sedang memperbaiki masalah perekonomiannya Indonesia tentu mempunyai masalah-masalah makro ekonomi, masalah ini merupakan masalah pokok yang dihadapi dan perlu penanganan khusus dari pihak pemerintahan. Ardian et al (2021) menyatakan bahwa, salah satu masalah pokok yang dihadapi negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah masalah pengangguran. Sementara, menurut Sambaulu et al (2022) pengangguran merupakan suatu keadaan

dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, kemudian ingin mendapatkan pekerjaan akan tetapi belummemperolehnya.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya kepada seluruh masyarakat, termasuk dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah sehingga struktur perekonomian seimbang (Priyanti et al., 2023; Wardhana et al., 2024). Namun, pembangunan ekonomi di Indonesia dewasa ini masih dihadapi oleh masalah klasik, yaitu pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang sangat besar setiap tahun tentu berdampak pada bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan masalah ketenagakerjaan juga akan bertambah (Kurniawan et al., 2023). Sementara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative (Putri & Muljaningsih, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia berfungsi untuk mengukur capaian dari pembangunan manusia yang berdasarkan komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang. Komponen dasar dari Indeks Pembangunan Manusia itu mencakup keterampilan dan kesehatan. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Semakin tingginya kualitas hidup manusia maka akan menunjang peningkatan produktivitas barang dan jasa yang akan dihasilkan dengan begitu semakin tinggi IPM akan mempengaruhi tenaga kerja dalam mencari pekerjaan (Bugis & Hahury, 2022; Prayogo & Hasmarini, 2022).

Selain itu, belanja modal pemerintah dan penanaman modal swasta dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja, dalam mengoperasikan tata Kelola pemerintah tentu diperlukan pegawai negeri, dalam sisi lainnya perluasan factor produksi (investasi) akan membesar skala penyerapan tenaga kerja. Hal – hal tersebut sangat memungkinkan dalam pengentasan pengangguran, dan memungkinkan lebih banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya dapat menyelesaikan tantangan utama pembangunan yaitu memperbaiki kualitas kehidupan sebagai berikut ini:

**Tabel 1. Data Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2015**

Provinsi	Tahun (%)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	67.09	67.45	67.81	68.30	68.81	69.45
Sumatera Utara	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51
Sumatera Barat	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98
Riau	68.65	68.90	69.15	69.91	70.33	70.84
Jambi	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	68.89
Sumatera Selatan	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46
Bengkulu	65.35	65.96	66.61	67.50	68.06	68.59
Lampung	63.71	64.20	64.87	65.73	66.42	66.95
Kep.Bangka Belitung	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05
Kep. Riau	71.13	71.61	72.36	73.02	73.40	73.75
Dki Jakarta	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99
Jawa Barat	66.15	66.67	67.32	68.25	68.80	69.50
Jawa Tengah	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49
Di Yogyakarta	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59
Jawa Timur	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95
Banten	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27
Bali	70.10	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27
Nusa Tenggara Barat	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19
Nusa Tenggara Timur	59.21	60.24	60.81	61.68	62.26	62.67

Kalimantan Barat	61.97	62.35	63.41	64.30	64.89	65.59
Kalimantan Tengah	65.96	66.38	66.66	67.41	67.77	68.53
Kalimantan Selatan	65.20	65.89	66.68	67.17	67.63	68.38
Kalimantan Timur	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17
Kalimantan Utara	-	-	-	67.99	68.64	68.76
Sulawesi Utara	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96	70.39
Sulawesi Tengah	63.29	64.27	65.00	65.79	66.43	66.76
Sulawesi Selatan	66.00	66.65	67.26	67.92	68.49	69.15
Sulawesi Tenggara	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07	68.75
Gorontalo	62.65	63.48	64.16	64.70	65.17	65.86
Sulawesi Barat	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24	62.96
Maluku	64.27	64.75	65.43	66.09	66.74	67.05
Maluku Utara	62.79	63.19	63.93	64.78	65.18	65.91
Papua Barat	59.60	59.90	60.30	60.91	61.28	61.73
Papua	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25
<b>Indonesia</b>	<b>66.53</b>	<b>67.09</b>	<b>67.70</b>	<b>68.31</b>	<b>68.90</b>	<b>69.55</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku (2022)

**Tabel 2. Data Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2022**

Provinsi	Tahun (%)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	70.00	70.60	71.19	71.90	71.99	72.18	72.80
Sumatera Utara	70.00	70.57	71.18	71.74	71.77	71.00	72.71
Sumatera Barat	70.73	71.24	71.73	72.39	72.38	72.65	73.26
Riau	71.20	71.79	72.44	73.00	72.71	72.94	73.52
Jambi	69.62	69.99	70.65	71.26	71.29	71.63	72.14
Sumatera Selatan	68.24	68.86	69.39	70.02	70.01	70.24	70.90
Bengkulu	69.33	69.95	70.64	71.21	71.40	71.64	72.16
Lampung	67.65	68.25	69.02	69.57	69.69	69.90	70.45
Kep. Bangka Belitung	69.55	69.99	70.67	71.30	71.47	71.69	72.24
Kep. Riau	73.99	74.45	74.84	75.48	75.59	75.79	76.46
Dki Jakarta	79.60	80.06	80.47	80.76	80.77	81.11	81.65
Jawa Barat	70.05	70.69	71.30	72.03	72.09	72.45	73.12
Jawa Tengah	69.98	70.52	71.12	71.73	71.87	72.16	72.79
Di Yogyakarta	78.38	78.89	79.53	79.99	79.97	80.22	80.64
Jawa Timur	69.74	70.27	70.77	71.50	71.71	72.14	72.75
Banten	70.96	71.42	71.95	72.44	72.45	72.72	73.32
Bali	73.65	74.30	74.77	75.38	75.50	75.69	76.44
Nusa Tenggara Barat	65.81	66.58	67.30	68.14	68.25	68.65	69.46
Nusa Tenggara Timur	63.13	63.73	64.39	65.23	65.19	65.28	65.90
Kalimantan Barat	65.88	66.26	66.98	67.65	67.66	67.90	68.63
Kalimantan Tengah	69.13	69.79	70.42	70.91	71.05	71.25	71.63
Kalimantan Selatan	69.05	69.65	70.17	70.72	70.91	71.28	71.84

Kalimantan Timur	74.59	75.12	75.83	76.61	76.24	76.88	77.44
Kalimantan Utara	69.20	69.84	70.56	71.15	70.63	71.19	71.83
Sulawesi Utara	71.05	71.66	72.20	72.99	72.93	73.30	73.81
Sulawesi Tengah	67.47	68.11	68.88	69.50	69.55	69.79	70.28
Sulawesi Selatan	69.76	70.34	70.90	71.66	71.93	72.24	72.82
Sulawesi Tenggara	69.31	69.86	70.61	71.20	71.45	71.66	72.23
Gorontalo	66.29	67.01	67.71	68.49	68.68	69.00	69.81
Sulawesi Barat	63.60	64.30	65.10	65.73	66.11	66.36	66.92
Maluku	67.60	68.19	68.87	69.45	69.49	69.71	70.22
Maluku Utara	66.63	67.20	67.76	68.70	68.49	68.76	69.47
Papua Barat	62.21	62.99	63.74	64.70	65.09	65.26	65.89
Papua	58.05	59.09	60.06	60.84	60.44	60.62	61.39
<b>Indonesia</b>	<b>70.18</b>	<b>70.81</b>	<b>71.39</b>	<b>71.92</b>	<b>71.94</b>	<b>72.29</b>	<b>72.91</b>

**Sumber:** BPS Provinsi Maluku (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Karena IPM ini merupakan bukti dari kerja nyata pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator strategis yang banyak dipakai untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan pengukuran komparatif dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Indeks pembangunan manusia dipakai untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara merupakan negara maju, negara berkembang atau negara terkebelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Sementara, Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pokok Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 52, Belanja Modal merupakan belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD digunakan untuk belanja yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk dipakai dalam kegiatan pemerintahan.

**Tabel 3. Data Belanja Modal Di Indonesia Tahun 2010-2022**

Tahun	Belanja Modal (Triliun)
2010	25 339
2011	26 333
2012	29 970
2013	36 569
2014	36 839
2015	45 158
2016	44 777
2017	47 329
2018	51 522
2019	50 566
2020	57 371
2021	40 491
2022	52 401

**Sumber:** BPS Provinsi Maluku (2022)

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan Belanja Modal mengalami perubahan setiap tahunnya. Belanja modal terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 25 339 triliun dan Belnja Modal terbesar pada tahun 2020 sebesar 57 371 triliun. Kenaikan belanja modal di

Indonesia dikarenakan pemerintah memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana umum dan dapat memberikan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan penurunan belanja modal di Indonesia dikarenakan penurunan penerimaan di tiap-tiap daerah. Baharuddin et al (2023) berpendapat bahwa belanja modal dapat diartikan sebagai pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membangun, mengadakan atau membeli aset. Karena belanja modal merupakan pembentukan aset tetap, maka dampak positif yang ditimbulkan juga berlangsung lama. Selain membuka kesempatan kerja belanja pemerintah dapat menjadi menambah penerimaan masyarakat yang kemudian mendorong peningkatan pada permintaan agregat. Peningkatan permintaan agregat ini akan menstimulus produsen untuk menambah kapasitas produksi dan mendorong investasi-investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru. Belanja modal yang terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk investasi infrastruktur, berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dapat juga berdampak terhadap inflasi, sekalipun dampaknya tersebut bervariasi tergantung pada konteks ekonomi dan keputusan kebijakan lainnya.

Dalam konteks belanja modal, penelitian Widodo (2020) menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB). Namun, efek ini tidak selalu linier; penelitian oleh Arini dan Kusuma mengungkapkan bahwa belanja modal secara teori berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam praktiknya pengaruhnya mungkin negatif dan tidak signifikan (Arini & Kusuma, 2019). Fenomena ini dapat dijelaskan dengan adanya masalah struktural dalam pengelolaan belanja yang dapat memicu peningkatan inflasi jika tidak diimbangi dengan efisiensi pengeluaran. Inflasi sendiri dipengaruhi oleh sejumlah faktor makroekonomi, termasuk belanja pemerintah. Devi et al. menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menimbulkan tekanan inflasi, terutama apabila pengeluaran tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas (Devi et al., 2022). Dalam konteks ini, pengeluaran untuk belanja modal dapat menyebabkan inflasi cost-push, di mana peningkatan biaya bahan baku dan tenaga kerja tidak dapat diserap oleh kenaikan harga barang dan jasa, akibat daya beli masyarakat yang rendah (Perdana & Setyari, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan saling mempengaruhi antara inflasi dan belanja modal sebagai hasil dari pertimbangan pengeluaran dan penerimaan.

Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi karena inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan internasional, nilai utang piutang antar negara, tingkat bunga, tabungan domestik, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri nilai inflasi tergolong tinggi sehingga banyak masalah ekonomi susulan yang mengintai. Selain itu, inflasi di Indonesia sangat "sensitif" dan mudah sekali naik. Inflasi di Indonesia diumpamakan seperti penyakit endemis dan berakar di sejarah. Salah satu cara meredam laju inflasi adalah Jumlah Uang Beredar. Inflasi sangat dipengaruhi dengan jumlah uang beredar di suatu negara.

**Tabel 4. Data Inflasi Di Indonesia Tahun 2010-2022**

Tahun	Inflasi (%)
2010	6,69
2011	3,79
2012	4,30
2013	8,38
2014	8,36
2015	3,35
2016	3,02
2017	3,61
2018	3,13
2019	2,72
2020	1,68
2021	1,87
2022	5,51

**Sumber:** BPS Provinsi Maluku (2022)

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang merujuk pada peningkatan umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi selama periode waktu tertentu. Annisa (2022) dan Nurhayati et al (2022) berpendapat bahwa, baik dalam perspektif ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan daya beli uang, di mana dengan inflasi yang tinggi, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu menjadi berkurang, mencerminkan dampak langsungnya terhadap daya beli masyarakat (Helmiyanti & Khoirudin, 2024). Dalam konteks pengukuran inflasi, Muliana et al (2023) mencatat pentingnya pengamatan inflasi sebagai alat ukur dalam perekonomian suatu negara. Inflasi yang tinggi dapat berimplikasi negatif, seperti penurunan daya beli masyarakat dan turunnya pendapatan nasional. Ketika inflasi meningkat, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di pasar, yang pada gilirannya berdampak pada keputusan investasi dan konsumsi. Sari menegaskan bahwa inflasi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal dalam perekonomian, seperti nilai tukar dan suku bunga (R. I. P. Sari, 2022; Sartika et al., 2019).

Terdapat beberapa tipe inflasi, termasuk inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) dan inflasi dorongan biaya (*cost-push inflation*). Inflasi tarikan permintaan terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi, sedangkan inflasi dorongan biaya muncul akibat kenaikan biaya produksi (Sutawijaya, 2012). Pengenalan dan pemahaman terhadap jenis-jenis inflasi ini membantu dalam pembentukan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, yang nantinya diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, inflasi adalah indikator penting yang mencerminkan kesehatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang inflasi dan faktor-faktornya adalah esensial bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Inflasi terjadi peningkatan pada tahun 2013 sebesar 8,38 % yang terjadi karena kenaikan harga bahan makanan sedangkan Inflasi mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,68 % yang terjadi karena penurunan daya beli akibat pandemic Covid-19. Penyerapan Tenaga kerja adalah hal yang mendasar pada kehidupan manusia, yang terdiri dari aspek sosial dan ekonomi. Karena penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Negara berkembang yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang merata. (Alamsyah & Hasmarini, 2021) mengartikan bahwa tenaga kerja adalah jumlah semua penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja.

**Tabel 5. Data Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 2010-2022**

Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja
2010	108207767
2011	107416309
2012	112504868
2013	112761072
2014	114628026
2015	114819199
2016	118411973
2017	121022423
2018	126282186
2019	128755271
2020	128454184
2021	131050523
2022	135296713

**Sumber:** BPS Provinsi Maluku (2022)

Data penyerapan tenaga kerja tahun 2010-2022 mengalami peningkatan yang didorong oleh bertambahnya proporsi penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Penyerapan tenaga



kerja yang dilakukan merupakan jumlah tenaga kerja yang diserap dalam usaha tertentu. Namun kemampuan penyerapan akan berbeda satu unit usaha dengan usaha lainnya karena kemampuan unit usaha yang berbeda-beda (Pasya, 2025; Hahury, 2023). IPM yang tinggi tidak menjamin terserapnya tenaga kerja secara maksimal. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan cenderung memilih tenaga kerja dengan upah yang tidak tinggi. Selain itu, IPM yang tinggi belum tentu sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh penyedia lapangan pekerjaan. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat berdampak pada pengurangan penyerapan tenaga kerja. Hal ini karena inflasi dapat menyebabkan naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, sehingga kesejahteraan masyarakat juga menurun. Hal ini dapat menyebabkan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kajian tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja modal, dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia telah menyentuh tema ini. Penelitian oleh (Saraswati et al., 2022; Sari, 2023), menunjukkan bahwa belanja modal berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja, namun hasilnya bervariasi tergantung konteks regional dan metode analisis yang digunakan. Selain itu, studi dari Indarwati & Woyanti (2023) mengindikasikan bahwa inflasi memiliki dampak tidak langsung terhadap pengangguran yang tentunya relevan untuk diteliti lebih dalam. Sementara penelitian yang menggunakan pendekatan regresi data panel telah dilakukan oleh Pramono & Firdayetti (2020) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja spesifik di Provinsi Jawa Tengah, tetapi tidak mencakup variasi di luar ruang lingkup tersebut. Selanjutnya, penelitian Wulandari & Sa'adah (2019) mendalami kebijakan pemerintah terhadap tenaga kerja asing, tetapi pengaruh inflasi dan belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja dalam waktu jangka panjang belum dieksplorasi secara mendalam.

Temuan-temuan pada kajian di atas memang telah membahas pengaruh IPM, belanja modal dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia akan tetapi kajian-kajian tersebut masih berfokus pada masing-masing daerah dan belum mempertimbangkan interaksi antara variabel-variabel tersebut dalam konteks Indonesia yang semakin kompleks. Apalagi terdapat perbedaan regional dalam penerapan variabel-variabel makro ekonomi tersebut yang belum dieksplorasi, terutama kebutuhan untuk analisis longitudinal yang mengintegrasikan data selama periode tertentu. Dimana, analisis longitudinal akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai fluktuasi ketenagakerjaan sebagai respons terhadap kebijakan dan kondisi ekonomi makro.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kajian pengaruh IPM, Belanja Modal, Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 2010-2022 menarik untuk dilakukan. Adapun pertanyaan penelitian yang dikemukakan adalah Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia? Bagaimana Pengaruh Belanja Modal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia? Bagaimana Pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia?

## METODE

Kajian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel independen. Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (X1), Belanja Modal (X2), Inflasi (X3) dan Variable terikat (Dependen) dalam penelitian ini adalah Penyerapan Tenaga Kerja (Y). Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara studi kepustakaan selama 12 tahun,. Sementara, teknik Analisis Data, menggunakan Model Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis Model*). Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghazali, 2013). Penelitian ini juga diuji dengan menggunakan uji parsial (t-test) untuk dapat mengetahui pengaruh antar variabel. Adapun juga fungsi dan persamaan dari regresi linear berganda didahului dengan model matematisnya sebagai berikut:

$$PTN = f(IPM, BM, Inf)$$

Berdasarkan model tersebut, maka persamaan regresi linier berganda adalah

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Pengolahan data penelitian ini menggunakan program Eviews dengan tingkat signifikansi pada *level of confidence* 95 persen (95%) atau  $\alpha = 0.05$ .

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada guna menentukan model analisis yang sesuai. Adapun masing-masing pengujian yang dapat diuraikan sebagai berikut antara lain: Uji Normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Uji Multikolinieritas, digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara variable bebas (independent). Dilakukan dengan cara menganalisis matrik korelasi variable-variable independent. Jika variable-variable independent saling berkorelasi (diatas 0,9) dan nilai R2 yang dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris sangat tinggi dan nilai tolerans < 0,10 atau dengan nilai VIF (Variance Inflation Factor) > 10 maka mengindikasikan adanya multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji Autokorelasi, bertujuan dapat mengetahui apakah ada tidaknya hubungan korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Dan untuk dapat menemukan ada atau tidaknya terjadi korelasi maka perlu dilakukan pengujian. Durbin - Watson (D-W) Uji Hipotesis

### Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara:

**Uji F (Uji Simultan)**, Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variable independent secara bersama-sama (simultan) terdapat variable dependent. Pengujian ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut : Dengan menggunakan nilai probabilitas signifikansi : (a) Jika tingkat signifikansi lebih besar 0,05 maka disimpulkan bahwa H0 diterima, sebaliknya Ha ditolak. (b) Jika tingkat signifikansi lebih kecil 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak sebaliknya Ha diterima.

**Uji t (Uji Parsial)**, digunakan untuk menguji secara parsial antara variable bebas terhadap variable terikat dengan menggunakan taraf nyata 5%. Selain itu berdasarkan nilai t, maka dapat diketahui variable mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variable terikat (Ghozali, 2011:49). Uji t merupakan sebuah uji untuk menguji hipotesis rata-rata, uji t dapat dilakukan atas dua rata-rata satu sampel atau dua sampel pengamatan. Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variable bebas (Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Inflasi) terhadap variable terikat (Penyerapan Tenaga Kerja) secara terpisah ataupun bersama-sama. Untuk menguji antara X1, X2, dan X3 terhadap Y.

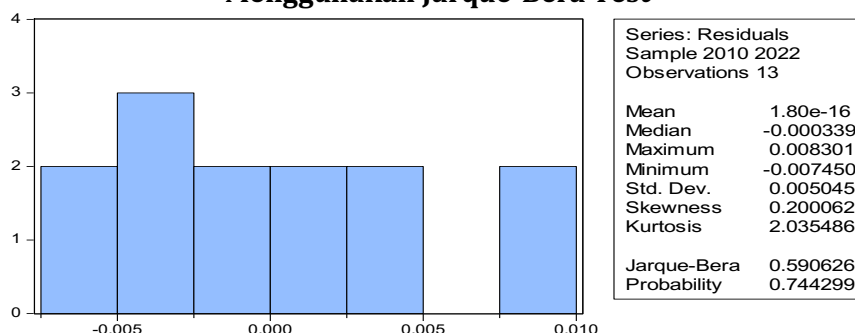
### Koefisien Determinasi (R2)

Dalam penelitian ini, memakai adjusted R2 untuk mengukur besarnya kontribusi variable X terhadap variasi (naik turunnya) variable Y. pemilihan adjusted R2 tersebut karena adanya kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi (R2). jumlah variable independent ditambahkan dalam model (Ghozali, 2011), nilai R2 menunjukkan seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variable terikat.

### Uji Asumsi Klasik

Untuk membuktikan apakah model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik atau belum :

**Hasil Uji Normalitas dapat dilihat pada gambar Menggunakan Jarque-Bera Test**





Nilai Probability sebesar 0.744299 dimana  $0.744299 > 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

### Hasil Uji Multikolinearitas

#### Variance Inflation Factors

Date: 04/27/25 Time: 12:48

Sample: 2010 2022

Included observations: 13

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.005893	2257.125	NA
IPM	3.93E-06	7373.673	6.232775
BM	0.001183	9630.997	5.646688
INFLASI	7.91E-07	7.104997	1.402434

Hasil di atas menunjukkan nilai Centered VIF baik  $X_1 = 6.232775$ ,  $X_2 = 5.646688$  dan  $X_3 = 1.402434$ , dimana nilai tersebut kurang dari 10 maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

#### Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.116223	Prob. F(3,9)	0.1683
Obs*R-squared	5.377189	Prob. Chi-Square(3)	0.1462
Scaled explained SS	1.334344	Prob. Chi-Square(3)	0.7210

Hasil analisis diperoleh nilai Prob.Chi-Square sebesar 0.1462, artinya prob  $>$  dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Autokorelasi

#### Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test :

F-statistic	0.137838	Prob. F(2,7)	0.8735
Obs*R-squared	0.492571	Prob. Chi-Square(2)	0.7817

Hasil analisis diperoleh nilai Obs\*R-squared = 0,492571 dan Prob.Chi-Square sebesar 0.7817, artinya prob  $>$  dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

#### Dependent Variable: LOG\_Y

Method: Least Squares

Date: 12/17/23 Time: 12:47

Sample: 2010 2022

Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.041941	0.076764	91.73503	0.0000
IPM	0.020575	0.001982	10.37947	0.0000
LOG_BM	-0.088510	0.034398	-2.573115	0.0300
INFLASI	0.000777	0.000889	0.873718	0.4050
R-squared	0.977988	Mean dependent var		8.076923
Adjusted R-squared	0.970651	S.D. dependent var		0.034006

S.E. of regression	0.005826	Akaike info criterion	-7.205402
Sum squared resid	0.000305	Schwarz criterion	-7.031571
Log likelihood	50.83511	Hannan-Quinn criter.	-7.241132
F-statistic	133.2918	Durbin-Watson stat	1.921416
Prob(F-statistic)	0.000000		

Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 7.041941 + 0.020575 X_1 - 0.088510 X_2 + 0.000777 X_3 + e$$

Dari hasil persamaan di atas diketahui bahwa :

- Konstanta, terlihat nilai konstanta sebesar 7.041941. Nilai konstanta tersebut menyatakan jika seluruh variabel independen yaitu IPM, Belanja Modal, Inflasi sama dengan nol, maka Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia sebesar 7.041941.
- Variabel IPM (X1), terlihat nilai koefisien variabel IPM (X1) sebesar 0.020575 hal ini menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 1% maka tingkat inflasi di Indonesia akan sebesar 0.020575%.
- Variabel Belanja Modal (X2), terlihat koefisien Belanja Modal (X2) sebesar -0.088510, hal ini menyatakan jika terjadi peningkatan investasi sebesar 1% maka akan diikuti dengan penurunan penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebesar - 0.088510%.
- Variabel Inflasi (X3), terlihat koefisien inflasi (X3) sebesar 0.000777 hal ini menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan inflasi sebesar 1% maka penyerapan tenaga kerja di Indonesia akan menurun sebesar 0.000777%.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.041941	0.076764	91.73503	0.0000
IPM	0.020575	0.001982	10.37947	0.0000
BM	-0.088510	0.034398	-2.573115	0.0300
INFLASI	0.000777	0.000889	0.873718	0.4050

Variabel IPM (X1) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang berarti variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia (Y). Variabel Belanja Modal (X2) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0300 yang berarti nilai probabilitas Belanja Modal lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Indonesia (Y). Variabel Inflasi (X3) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.4050, karena nilai probabilitas Inflasi lebih besar dari 0.05 yang berarti variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.

#### Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.977988	Mean dependent var	8.076923
Adjusted R-squared	0.970651	S.D. dependent var	0.034006
S.E. of regression	0.005826	Akaike info criterion	-7.205402
Sum squared resid	0.000305	Schwarz criterion	-7.031571
Log likelihood	50.83511	Hannan-Quinn criter.	-7.241132
F-statistic	133.2918	Durbin-Watson stat	1.921416
Prob(F-Statistic)	0.000000		

Terlihat nilai F statistik sebesar 133,2918 dengan nilai prob (f-statistic) sebesar 0,000000. Nilai prob (f-statistic) tersebut tentu lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05). Artinya H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Atau dengan kata lain variabel IPM, Belanja Modal, Inflasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.977988
Adjusted R-squared	0.970651
S.E. of regression	0.005826
Sum squared resid	0.000305
Log likelihood	50.83511
F-statistic	133.2918
Prob(F-statistic)	0.000000

Koefisien determinasi R<sup>2</sup> ketiga variabel bebas ditentukan oleh nilai customized R square. Hasil koefisien determinasi pada tabel 4.6 terlihat dari hasil uji determinasi R<sup>2</sup> pada output analisis regresi berganda tepatnya pada nilai R-Square sebesar 0.977988. Jadi pengaruh IPM, Belanja Modal, Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 97,79%. Sedangkan sisanya sebesar 2,21% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.

### Pengaruh IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia menjadi penting yang perlu dianalisis, mengingat IPM adalah ukuran yang mencerminkan kemajuan sosial dan ekonomi suatu daerah. Secara umum, peningkatan IPM berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, termasuk tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Penelitian Rasyid & K (2022) menunjukkan bahwa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan kesehatan berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. Di sisi lain, studi oleh Saraswati et al (2022) menegaskan pentingnya IPM sebagai faktor kunci yang mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan, di mana daerah dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih baik.

Kualitas pendidikan yang lebih baik yang tercermin dalam nilai IPM berimplikasi langsung pada keterampilan dan kemampuan tenaga kerja. Sebagai contoh Pratama & Arif (2024) mencatat bahwa sektor industri membutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil, dan daerah dengan IPM yang tinggi biasanya memiliki lebih banyak individu yang memenuhi syarat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan IPM tetapi juga mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja yang akhirnya mendorong penyerapan yang lebih baik di pasar kerja. Penelitian oleh Mulyadi et al (2024) juga menggarisbawahi bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik, sehingga peningkatan IPM dapat berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan lapangan kerja.

Namun, upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui IPM tidak selalu linear. Ada kalanya peningkatan IPM tidak diikuti dengan jumlah pekerjaan yang cukup, terutama di daerah-daerah yang masih dalam tahap pengembangan. Pandangan ini mempertegas bahwa, meskipun peningkatan IPM terjadi, masih ada tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang substansial bagi populasi yang terdidik Irawati & Prasetyanto (2022) dan Hahury et al (2023). Hasil uji variabel IPM menunjukkan nilai koefisien regresi yang besar yang berarti IPM berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja yang artinya semakin baik IPM maka Penyerapan Tenaga Kerja akan semakin buruk. Nilai probabilitas signifikansi IPM sebesar 0.0000 < nilai signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Hasil penelitian diketahui IPM berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sehingga H<sub>a</sub> diterima. Sesuai dengan penelitian Ayu et al (2025), tingginya IPM suatu daerah belum tentu menjamin terserapnya tenaga kerja. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian kualifikasi yang dibutuhkan oleh

perusahaan dimana perusahaan cenderung mencari tenaga kerja yang upahnya tidak terlalu tinggi. Ketika IPM meningkat berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi, hal ini memerlukan tambahan tenaga kerja sebagai faktor produksi untuk memenuhi permintaan agregat yang meningkat. Hal ini menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, kebijakan yang holistik perlu didorong untuk mengoptimalkan hubungan antara IPM dan penyerapan tenaga kerja, memastikan bahwa peningkatan kualitas hidup tidak hanya saling berkaitan, tetapi juga menghasilkan lapangan kerja yang relevan dan padat karya. Dengan kata lain, semakin sedikit tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan dapat menimbulkan pengangguran.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia**

Belanja modal sering kali dianggap sebagai alat yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Penelitian oleh Rachman et al (2022) menunjukkan bahwa belanja modal yang diinvestasikan dalam sektor-sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat jelas di provinsi-provinsi yang memiliki tingkat belanja modal yang tinggi, di mana angka pengangguran cenderung lebih rendah. Rachman mengemukakan bahwa peningkatan belanja modal tidak hanya mendukung penciptaan lapangan kerja tetapi juga menciptakan rantai nilai yang lebih luas dalam ekonomi lokal. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek yang menciptakan lapangan kerja, dampak belanja modal dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi inklusif.

Namun, ada tantangan dalam optimalisasi belanja modal yang perlu diperhatikan. Rudibdo & Sasana, (2017) mencatat bahwa meskipun belanja modal dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, efektivitasnya sering kali tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mendistribusikan anggaran. Kelemahan dalam manajemen anggaran dan korupsi yang terjadi dalam beberapa kasus menyebabkan alokasi belanja modal tidak efektif, sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja tidak optimal. Sehingga, perlu ada pengawasan yang ketat dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja modal untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar memfasilitasi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Temuan dalam kajian ini memperlihatkan, jika belanja modal mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap di Indonesia. Pengaruh tersebut dijelaskan oleh nilai koefisien sebesar  $-0.088510$  yang berarti setiap kenaikan belanja modal sebesar 1% maka jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ekonomi juga akan meningkat sebesar  $-0.088510\%$ , tentunya dengan asumsi variabel selain belanja modal adalah tetap. Belanja modal dapat diartikan sebagai pembiayaan/pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membangun, mengadakan, atau membeli aset. Karena Belanja Modal merupakan pembentukan aset tetap, maka dampak positif yang timbul juga akan bertahan lama. Selain membuka lapangan kerja, belanja pemerintah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian mendorong peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat ini akan merangsang produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

### **Pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia**

Pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia merupakan salah satu isu krusial yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tinggi tidak hanya mengurangi daya beli masyarakat, tetapi juga dapat mengakibatkan pengurangan lapangan kerja. Hal ini terjadi karena biaya operasional yang meningkat membuat perusahaan cenderung mengurangi tenaga kerja untuk mempertahankan margin keuntungan. William et al (2022) berpendapat bahwa kenaikan inflasi secara signifikan memengaruhi tingkat pengangguran, di mana perusahaan lebih cenderung untuk melakukan pemotongan tenaga kerja dalam situasi inflasi yang tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka pengangguran di kalangan angkatan kerja. Dampak inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja juga dapat terlihat pada sektor yang lebih rentan, seperti ekonomi informal, yang sering kali lebih sulit beradaptasi dengan fluktuasi harga.

Lebih jauh lagi, inflasi yang tidak terkendali dapat menghambat investasi, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam analisis yang dilakukan oleh Muin (2015) ditemukan bahwa inflasi dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang menekan perusahaan untuk menahan investasi baru. Ketidakpastian ini menghalangi ekspansi bisnis dan inovasi, yang berimplikasi pada lambatnya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan moneter yang efektif dan transparan dalam mengatasi inflasi, untuk mendukung proses penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang padat karya.

Namun, efek inflasi tidak selalu negatif jika dikelola dengan baik. Hal tersebut diutarakan oleh Soekapdjo & Oktavia (2021) bahwa dalam beberapa kondisi, inflasi yang moderat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terukur dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi, dan dalam beberapa kasus, mendorong bisnis untuk memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan efek positif inflasi pada penyerapan tenaga kerja, pemerintah perlu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan mendukung inovasi, serta menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi dinamika pasar yang disebabkan oleh fluktuasi inflasi.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,000777 dan probabilitas sebesar 0,4050. Artinya apabila terjadi kenaikan atau penurunan inflasi tidak akan mengakibatkan perubahan jumlah penyerapan tenaga kerja. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian makroekonomi karena berdampak luas terhadap berbagai sektor perekonomian. Tingkat inflasi yang tinggi dapat merugikan perekonomian karena inflasi dapat melemahkan daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi. Akibat menurunnya tingkat konsumsi dapat berdampak pada melambatnya perkembangan produksi.

Hasil pengujian data menyatakan bahwa variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dikarenakan inflasi yang terjadi di Indonesia bukanlah inflasi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan (demand pull Inflation) melainkan inflasi yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik (Qurayshilhady, 2024). Palsunya, inflasi yang terjadi di Indonesia sebagian besar terjadi pada barang konsumsi. Inflasi seperti ini mempunyai dampak yang sangat kecil terhadap keputusan ketenagakerjaan yang dibuat oleh dunia usaha, rumah tangga, dan pemberi kerja lainnya, sehingga para ekonom menganggapnya tidak penting. Inflasi adalah kecenderungan harga-harga meningkat secara umum dan terus menerus.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia yang berarti IPM berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia yang berarti semakin tinggi belanja modal maka penyerapan tenaga kerja di Indonesia akan meningkat. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia yang berarti semakin tinggi inflasi maka penyerapan tenaga kerja semakin menurun. Sementara itu, saran yang dapat penulis berikan antara lain bagi pemerintah disarankan untuk memprioritaskan pengembangan sector-sektor industry dan jasa sehingga adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kemudian, peranan pemerintah untuk mengendalikan terjadinya inflasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam proses penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan dengan terkendalinya inflasi maka sektor-sektor usaha dalam penyerapan tenaga kerja dapat mengalami peningkatan.

IPM yang menjadi salah satu pokok dalam permasalahan terjadinya pengangguran, Penduduk adalah salah satu resources yang perlu mendapat perhatian karena dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan suatu daerah. Karakteristik pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk, penekanan slaju urbanisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Angkatan kerja yang semakin meningkat setiap tahunnya harus lebih



diperhatikan oleh pemerintahan daerah, karna dalam angkatan kerja tersebut dapat menurunkan kualitas taraf hidup yang layak, dan diperlukan pelatihan-pelatihan untuk menambah kemampuan para pekerja dalam bidang yang akan ditekuninya, dan juga lapangan kerja harus lebih dimaksimalkan lagi untuk menampung angkatan kerja yang setiap tahunnya akan semakin meningkat, saat ini pengangguran didominasi kaum intelektual yang sudah mendapat gelar strata satu (S1), maka dari itu harus adanya lowongan yang mampu menampung kondisi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. (2022). *Inflasi Dan Pengangguran Dalam Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jhm8f>
- Ardian, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 23–34.
- Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Investasi Swasta Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1), 28. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i1.611>
- Ayu, V. A. L., Krisnha, P. H., & Mariyanti, T. (2025). Determinan Pengaruh Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 383–396.
- Baharuddin, D., Purnama, H. R., & Maknun, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pengeluaran Pemerintah. *Center of Economic Students Journal*, 6(1), 81–90.
- Bugis, M., & Hahury, H. D. (2022). The Diversification Of Coastal Women’s Livelihoods As A Way Out Of Poverty: The Experience of Indigenous Community of Negeri Booi, Central Maluku. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3).
- Devi, A. S., Masnila, N. M., & Nurhasanah, N. N. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea*, 3(6), 971. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i06.1872>
- Ghazali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hahury, H. D., Saptanno, F., Batkunda, L., Louhenapessy, F. H., & Oppier, H. (2023). Tourism Development and Impacts of Local Livelihood Transition on The Highlands Of Mount Nona, Ambon Island. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 8(1), 11.
- Helmiyanti, M., & Khoirudin, R. (2024). Analisis Efektivitas Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Investasi Asing Langsung, Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008 – 2021 (Studi Kasus: 8 Negara ASEAN). *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 72–82. <https://doi.org/10.29407/jse.v7i1.483>
- Indarwati, P. A., & Woyanti, N. (2023). Analisis Pengaruh PDRB, Tenaga Kerja, UMP, Dan IPM Terhadap Pengangguran Pulau Jawa Tahun 2010 – 2019. *Jepp Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 3(1), 46–56. <https://doi.org/10.52300/jepp.v3i1.8406>
- Irawati, V. K., & Prasetyanto, P. K. (2022). Analisis Variabel Makroekonomi Dalam Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. *Revenue Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 5(02), 40–47. <https://doi.org/10.56998/jr.v5i02.51>
- Kurniawan, P. C., Khilmiana, N., Arifin, S., & Maisaroh, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Pekalongan. *Journal of Economic and Management (JECMA)*, 5(1), 95–103.
- Muin, F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1838>
- Muliana, M., Fitrianti, R., Riana, A. D., & Rusneni, R. (2023). Analisis Tingkat Suku Bunga, Kurs Dan Inflasi Di Indonesia Dengan Pendekatan Autoregressive Distributed Lag. *Point Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(2), 142–151. <https://doi.org/10.46918/point.v5i2.1834>
- Mulyadi, A., Badriah, L. S., & Arifin, A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terdidik Di Indonesia. *Isoquant Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 10–23. <https://doi.org/10.24269/iso.v8i1.2635>
- Nurhayati, N., Husnah, I., Arkam, F., & febianil. (2022). *Makalah Ekonomi Makro Syariah “Inflasi Dan*



- Pengangguran Dalam Ekonomi Islam.*” <https://doi.org/10.31219/osf.io/zcuyl>
- Perdana, I. K. R., & Setyari, N. P. W. (2023). Analisis Faktor-Faktor Makroekonomi Yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1594. <https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i08.p12>
- Pramono, K. D., & Firdayetti. (2020). Determinasi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 819–832. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14436>
- Pratama, M. A. R., & Arif, M. (2024). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Industri Sedang Dan Besar Di Kabupaten Jepara Tahun 2001-2022. *Jurnal Emt Kita*, 8(1), 347–354. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.2096>
- Prayogo, I., & Hasmarini, M. I. (2022). Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Yogyakarta Tahun 2018-2021. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 77–85.
- Priyanti, R., Syafruddin, S., & Pamungkas, B. D. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Perdesaan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(2), 190–201.
- Putri, N. M., & Muljaningsih, S. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pengangguran, Indeks Pelayanan Kesehatan dan Indeks Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) di Kabupaten Bojonegoro. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 10(1), 59–71.
- Qurayshilhady, A. (2024). *Pengaruh Investasi Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rachman, A., Muthalib, A. A., Rosnawintang, R., & Harafah, L. M. (2022). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektorial Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (Jpep)*, 7(2), 156. <https://doi.org/10.33772/jpep.v7i2.22541>
- Rasyid, H. Al, & K, A. T. I. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bogor Dari Tahun 2010 - 2020. *Owner*, 6(4), 4167–4174. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1157>
- Rudibdo, R., & Sasana, H. (2017). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Ekskaresidenan Semarang Pada Era Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 215–226. <https://doi.org/10.31002/rep.v2i3.531>
- Sambaulu, R. A., Rotinsulu, T. O., & Lopian, A. L. C. P. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 37–48.
- Saraswati, B. D., Krisnawati, Y. D., & Adhitya, D. (2022). Determinan Penyerapan Tenaga Kerja 34 Provinsi Di Indonesia: Pendekatan Fixed Effect Model. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (Mea)*, 6(3), 1139–1156. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2218>
- Saraswati, B., Krisnawati, Y., & Adhitya, D. (2022). Determinan Penyerapan Tenaga Kerja 34 Provinsi Di Indonesia: Pendekatan Fixed Effect Model. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3 SE-Articles). <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2218>
- Sari, R. I. P. (2022). Fdi Dan Inflasi Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Kosmetik Di Indonesia. *Jabe (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(4), 451. <https://doi.org/10.30998/jabe.v8i4.14440>
- Sari, Y. A. (2023). Analisis Spasial Dan Faktor-Faktor Berpengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. *Geodika Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 7(2), 251–262. <https://doi.org/10.29408/geodika.v7i2.21366>
- Sartika, U., Siddik, S., & Choiriyah, C. (2019). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(2), 75. <https://doi.org/10.32502/jimn.v8i2.1821>
- Soekapdjo, S., & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 94–102. <https://doi.org/10.31294/eco.v5i2.10070>
- Sutawijaya, A. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(2), 85–101. <https://doi.org/10.33830/jom.v8i2.237.2012>
- Wardhana, I. W., Syahyuti, S., Jamal, E., & Silalahi, S. A. F. (2024). Urgensi dan Strategi Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi Nasiona. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4, 1–10.
- Widodo, S. (2020). *Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Modal, Belanja Barang, Dan Belanja*

- Bantuan Sosial) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pdrb) Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2019.* 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i2.87>
- William, W., Maryati, M., Khesi, K., Alvina, J., & Ng, S. N. S. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Inflasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1066–1073. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.101>
- Wulandari, G. S., & Sa'adah, N. (2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Atas Kebijakan Pemerintah Terkait Penerimaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 313–326. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12823>